

**MEMORIA PASSIONIS PAPUA**

**Konflik Papua sebagai Inspirasi Penciptaan Seni Lukis**



**PENCIPTAAN KARYA SENI**

Oleh

Ignasius Dicky Takndare

NIM 0611804021

**MINAT UTAMA SENI LUKIS**

**PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI**

**JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA**

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**2013**

# MEMORIA PASSIONIS PAPUA

## Konflik Papua sebagai Inspirasi Penciptaan Seni Lukis



**MINAT UTAMA SENI LUKIS**

**PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI**

**JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA**

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**2013**

**MEMORIA PASSIONIS PAPUA**

**Konflik Papua sebagai Inspirasi Penciptaan Seni Lukis**



Ignasius Dicky Takndare

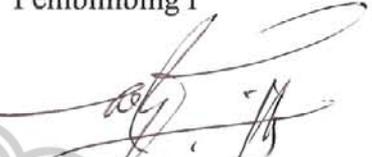
NIM 0611804021

**MINAT UTAMA SENI LUKIS**  
**PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI**  
**JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA**  
**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**  
**2013**

Tugas Akhir Penciptaan Karya Seni berjudul:  
MEMORIA PASSIONIS PAPUA diajukan oleh Ignasius Dicky Takndare, NIM  
0611804021, Program Studi Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni, Fakultas Seni  
Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan di depan  
Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 25 Juni 2013 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk diterima.



Drs. Sudarisman  
Pembimbing I



Mikke Susanto, S.Sn., M.A  
Pembimbing II



Drs. Soewardi, M.Sn  
Cognate / Anggota



Wiwik Sri Wulandari, M.Sn  
Ketua Jurusan, Program Studi  
Ketua / Anggota

Dekan Fakultas Seni Rupa  
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Drs. Suastiwi, M.Des  
NIP. 19590802 198803 2 001

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk Mama tersayang

yang mencurahkan seluruh hidupnya demi Seni-ku

Juga untuk semua orang Papua

yang sungguh butuh keadilan



## KATA PENGANTAR

Seni adalah bahasa *universal* yang menembus segala batas kehidupan manusia. Seni lukis merupakan salah satu bahasa yang dapat dipakai mengungkapkan banyak hal secara visual. Itulah sebabnya seni lukis berkembang bersama zaman dan tak habis daya tariknya.

Dalam prakteknya kelompok Seniman terbagi menjadi seniman akademik dan seniman otodidak (yang tidak menimba ilmu melalui jalur akademis). Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Seorang seniman akademis dituntut untuk tidak hanya mengerti bagaimana melukis dengan baik, tetapi menguasai semua pengetahuan yang berhubungan dengan seni yang dialami. Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah salah satu institusi yang mencetak calon-calon seniman akademis yang unggul pada bidangnya. Sebagai salah satu mahasiswa yang merupakan binaan ISI Yogyakarta, penulis merasa mendapatkan banyak sekali pemahaman yang berguna untuk mengembangkan kemampuan berkesenian penulis di masa yang akan datang.

Segala jenis ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan selama berkuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta penulis pakai untuk merespon gejala-gejala sosial yang terjadi seputar lingkungan penulis. Proses Tugas Akhir ini adalah salah satu pengaplikasian ilmu tersebut yang pada kesempatan ini penulis pakai untuk membahas permasalahan seputar konflik Papua.

Selama proses Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak pelajaran yang tidak hanya berhubungan dengan disiplin ilmu penulis, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, walaupun baru terbatas kalangan tertentu. Hal itu semua coba penulis rangkum dalam tulisan yang singkat ini.

Sebagai sebuah karya, tentu Tugas Akhir ini memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi membangun relasi bersama dalam berkarya.

Besar harapan kami agar tulisan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan memberi manfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.

Yogyakarta, 25 Juni 2013



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KE I .....	i
HALAMAN JUDUL KE II .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penciptaan .....	1
Sejarah Integrasi Papua ke dalam NKRI .....	4
Kekerasan Politik dan Pelanggaran HAM .....	12
Inkonsistensi Pemerintah dan Lambannya Pembangunan di Papua .....	15
Marjinalisasi Pribumi Papua .....	19
B. Rumusan Penciptaan .....	23
C. Tujuan dan Manfaat .....	23
1. Tujuan Penciptaan .....	23
2. Manfaat Penciptaan .....	24
D. Makna Judul .....	24

### **BAB II KONSEP**

A. Konsep Penciptaan .....	27
1. Konsep Sebagai Landasan Penciptaan .....	28

2. Konsep Sebagai Sarana Penciptaan .....	28
a. Konsep Penciptaan Seni Lukis .....	29
B. Konsep Bentuk .....	30
1. Sosok Manusia Papua .....	32
2. Benda Sehari-Hari sebagai Simbol .....	38
3. Karya Acuan .....	47
C. Konsep Penyajian .....	54
<b>BAB III PROSES PEMBENTUKAN .....</b>	<b>55</b>
A. Bahan .....	55
1. Kanvas .....	56
2. Cat Lukis .....	57
3. Minyak Pengencer .....	58
B. Alat .....	
1. Spanram .....	59
2. Staples .....	60
3. Kuas .....	61
4. Palet .....	62
5. Pencuci Kuas .....	63
6. Alat Pendukung .....	64
C. Teknik .....	65
D. Tahapan Pembentukan .....	65
Persiapan .....	65
Tahap Pengeraman / Perenungan .....	66
Pelaksanaan .....	67

Evaluasi .....	71
Finishing .....	71
 <b>BAB IV DESKRIPSI KARYA 73</b>	
<b>The Ballad Of Ana</b> .....	76
<b>Deep Silent Sio Insose</b> .....	78
<b>No More Me</b> .....	80
<b>The Silent Target</b> .....	82
<b>We Plan New Idea for You</b> .....	84
<b>Oh Sekolahku</b> .....	86
<b>Sekolah???</b> .....	88
<b>I Can't Control My Self</b> .....	90
<b>Shut Up</b> .....	91
<b>Ikele Hele</b> .....	92
<b>DOM #1</b> .....	93
<b>DOM #2</b> .....	94
<b>DOM #3</b> .....	95
<b>DOM#4</b> .....	96
<b>Bloody Mary</b> .....	98
<b>Enggo Secret</b> .....	99
<b>The Border</b> .....	101
<b>Fumerepits</b> .....	103
<b>Meyae Phuyakha</b> .....	105
<b>Polutions</b> .....	106

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	108
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	117



## BAB I

### PENDAHULUAN



#### A. Latar Belakang Penciptaan

*“Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya, semua anugerah itu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu, harus ada perubahan, harus ada perubahan”<sup>1</sup>*

Kutipan lirik lagu ini walau singkat, menggambarkan keironisan yang terjadi di Papua. Tidak semua orang mengerti permasalahan yang terjadi di Papua dengan seksama. Bertahun-tahun sejak Papua berintegrasi masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis: NKRI), daerah ini tidak henti dilanda konflik. Berbagai macam teori serta sistem penanganan telah dilakukan, namun Papua tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Pulau Papua telah terkenal akan keindahan dan kekayaan alamnya. Berbagai hasil alam mulai dari hutan, serta hasil mineral bumi dan laut tersebar melimpah di pulau dengan luas kurang lebih 410.660 km persegi, atau sama dengan tiga setengah kali luas pulau Jawa.<sup>2</sup>

Pulau Papua terbentang dari garis khatulistiwa sampai 12<sup>0</sup> LS dan 129<sup>0</sup> – 155<sup>0</sup> BT. Sebagian besar daratannya adalah hutan hujan perawan yang

<sup>1</sup>Lirik lagu “Suara Kemiskinan”, album *single* Franky Sahilatua

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Monografi Daerah Irian Jaya*, (Jakarta: Departemen Pdan K.) p.17

paling luas di kawasan tropis dunia lama. Pulau Papua adalah pusat kawasan Pasifik Barat Daya, dikelilingi oleh pulau-pulau satelit dan kepulauan yang jaraknya bervariasi. Australia terbentang di sebelah selatannya; Kepulauan Maluku di sebelah baratnya; di sebelah Timur Laut terletak kepulauan Filipina; Pulau Mariana, Pulau Caroline, Pulau Marshall, dan Pulau Gilbert (Kiribati) tersebar di sebelah Utara dan Timur Laut; dan akhirnya Kepulauan Bismarck; Kepulauan Solomon, New Hebrides (Vanuatu), dan Kepulauan Fiji terletak di sebelah Timur dan Tenggara.<sup>3</sup>

Papua beriklim tropis. Suhu udara pada ketinggian permukaan laut hampir seragam bagi seluruh provinsi, yaitu rata-rata 26<sup>0</sup> Celcius. Variasi suhu terjadi karena ketinggian daerah yang berbeda-beda. Setiap ketinggian 100 meter terjadi penurunan suhu sebanyak 0.6<sup>0</sup> Celcius. Karena itu tanah pegunungan yang mencapai ketinggian lebih dari 4.400 meter senantiasa tertutup salju abadi<sup>4</sup>

Hasil sensus Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat adalah 760.422 jiwa dan Provinsi Papua adalah 2.833.381 jiwa, sehingga jika ditotal jumlah penduduk Papua keseluruhan adalah 3.593.803 jiwa. Perhitungan ini tidak hanya berlaku bagi penduduk yang asli Papua (pribumi), tetapi juga

---

<sup>3</sup>Beehler Bruce, Pratt Thane, dan Zimmerman Dale. *Birds Of New Guinea* (Princeton: Princeton University Press. 1986)p.3.

<sup>4</sup>Koentjaraningrat. *Irian Jaya. Membangun Masyarakat Majemuk*(Jakarta: Djambatan, 1993) p.16.

penduduk pendatang yang bermukim di sana seperti imigran dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.<sup>5</sup>

Hutan Papua yang sebagian besar belum terjamah dan menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Ratusan jenis hewan dan tumbuhan endemik hidup di sana. Sungai-sungai yang menghanyutkan emas, gas alam yang terus menerus keluar dari perut bumi, taburan nikel, tembaga dan banyak mineral lain yang baru sebagian kecilnya saja yang ditambang. Belum lagi hasil lautnya yang sangat kaya dengan kilang minyak yang tersebar di mana-mana. Biota laut Papua yang dikatakan terlengkap di dunia, serta terumbu karangnya yang disebut sebagai pusat pertahanan terumbu karang di planet ini (konon semua jenis terumbu karang dunia ada di Papua, kebanyakan di perairan Kepulauan Raja Ampat.)

Semua kekayaan yang melimpah itu sesungguhnya tidak patut dibanggakan jika melihat keadaan orang Papua saat ini. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat dan Papua adalah dua provinsi teratas dalam urutan Provinsi dengan penduduk miskin terbanyak.

Mengapa begitu ironis? Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membagi masalah Papua ke dalam 4 bagian.<sup>6</sup> Pertama adalah masalah sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

---

<sup>5</sup>Diunduh dari: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), tanggal 12 September 2012, 05.29 WIB.

<sup>6</sup> Tim LIPI, *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present and Securing TheFuture* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) p.6.

Indonesia. Kedua, kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ketiga, inkonsistensi pemerintah dan gagalnya pembangunan di Papua. Keempat, marginalisasi pribumi Papua. Berikut akan kami bahas tentang keempat masalah tersebut.

### **1. Sejarah Integrasi Papua Ke Dalam NKRI**

Analisis tim LIPI menekankan bahwa konflik Papua lebih disebabkan oleh perbedaan tajam dalam konstruksi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Bagi para nasionalis Indonesia, Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia, terlepas dari perbedaan-perbedaan ras maupun kebudayaan. Sementara nasionalis Papua berpendapat sebaliknya. Papua bukanlah bagian dari masyarakat Indonesia didasarkan pada perbedaan ras antara orang Indonesia ras Melayu dan orang Papua ras Melanesia.

Melanesia berasal dari bahasa Yunani yang berarti “Pulau Hitam”. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang pelaut Perancis Jules Dumont d'Urville pada 1832 untuk menyebut sebuah kelompok etnis yang tersebar dari wilayah Pasifik Barat Daya, Australia, hingga Laut Arafura. Kawasan yang termasuk wilayah-wilayah yang dihuni ras Melanesia antara lain Fiji, pulau Papua, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, Australia, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Timor.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> diunduh dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) pada 18 April 2013, pukul 01.00 WIB.

Ras Melanesia memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan orang-orang Melayu yang mendiami daerah bagian barat dalam wilayah NKRI, seperti Sulawesi, Kalimantan, Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Perbedaan tersebut tidak hanya tampak pada ciri fisiknya saja misalnya orang Melayu berkulit lebih terang dengan rambut yang pada umumnya lurus, sementara orang Melanesia berkulit lebih gelap, dengan rambut yang keriting atau ikal, tetapi juga pada bahasa, budaya, dan adat istiadat. Selain itu nasionalis Papua memiliki alasan sejarah yang memperkuat argumentasi mereka.

Papua adalah pulau misterius, saat daerah-daerah lain seperti Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku telah mengenal sistem pemerintahan Kerajaan, Papua masih menjadi daerah yang tabu. Dalam sejarah, Papua telah berkali-kali berganti nama, dan secara politis hanya dimasuki oleh dua pemerintahan, yaitu pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian Republik Indonesia. Para pedagang dan pelaut dari bangsa Cina menyebut tempat ini Janggi. Dari catatan Pieter Drooglever, tampak jelas bahwa sejak dulu orang-orang Papua telah memiliki relasi yang kuat dengan orang-orang Maluku. Dapat dilihat dalam sejarah Pangeran Kurabesi, seorang pemimpin adat asal Biak, yang memimpin pasukan teluk Saireri (Biak, Serui, Wandamen, dan sekitarnya) untuk membantu pemimpin-pemimpin Tidore yang kala itu sedang berperang dengan kerajaan Jailolo dan beberapa kerajaan lain. Seperti halnya dalam dongeng, dikisahkan bahwa Kurabesi dengan mudah menumpas musuh-musuh Sultan Tidore, sehingga

kesangaran Kurabesi saat itu sangat ditakuti. Beliau dihadiahi putri Sultan, mereka memiliki 4 putra yang kelak akan menjadi peletak dasar bagi Raja Ampat.<sup>8</sup>

Hubungan kekerabatan tersebut, oleh beberapa pihak diartikan berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hubungan tersebut membuktikan kalau Papua masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore. Adapun dipihak lain, orang-orang menentang ide tersebut. Hubungan itu bagi mereka hanya relasi, dan Sultan Tidore sama sekali tidak berkuasa atas Papua. Ada perbedaan antara berkuasa dan bersahabat. Orang-orang Maluku-lah yang memberikan nama Papua kepada bangsa tersebut. Kata tersebut berasal dari bahasa Melayu Kuno *Pua-Pua* yang berarti Rambut Keriting.

Pada pertengahan 1528, Alvaro de Saveedra yang diutus sepupunya yang terkenal Hernan Cortez untuk menjelajahi areal Samudera Pasifik dalam rangka mencari lahan baru, singgah di pantai utara pulau Papua. Beliau menamai tempat ini *Isla Del Oro*, yang berarti Pulau Emas. Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti alasan beliau memberikan nama tersebut kepada pulau ini.

Pada 20 Juni 1545, Armada Spanyol dengan kapal "San Juan", di bawah pimpinan Ynigo Ortiz de Retes, mendarat di muara Sungai Mamberamo di pantai utara Papua. Mereka hanya singgah untuk mengambil air dan kayu bakar. Ortiz de Retes kemudian menamai tempat tersebut "Nova Guinea",

---

<sup>8</sup>Drooglever P.J., *Tindakan Pilihan Bebas:Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) p.22

yang dalam peta Belanda ditulis “Nieuw Guinea”, dalam bahasa Inggris “New Guinea”, atau Guinea yang baru. Konon Ortiz memilih nama tersebut, karena melihat perawakan orang pribumi Papua yang mirip orang Guinea, sebuah daerah jajahan Spanyol di Afrika.

De Retes dan Saveedra sama-sama mengklaim tempat tersebut sebagai milik Kerajaan Spanyol, namun akibat konflik dengan pihak Belanda yang disebabkan oleh perebutan perdagangan rempah-rempah di Maluku, Spanyol menarik diri ke Filipina dan tak pernah muncul lagi di Papua. Setelah masa itulah Belanda mulai menjalankan usahanya untuk masuk ke Papua, yang saat itu sebenarnya masih diklaim secara sepihak sebagai milik Sultan Tidore, terutama di daerah Kepala Burung, atau pantai utara pulau Papua.<sup>9</sup>

Bulan Juli 1828 armada Belanda yang dikirim Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Maluku mendarat di pantai selatan Papua, tepatnya di utara wilayah Kepulauan Aru. Armada tersebut diperintahkan membangun sebuah benteng di wilayah tersebut sebagai bukti bahwa wilayah tersebut merupakan kekuasaan Belanda, kecuali wilayah kekuasaan Sultan Tidore di pantai Utara.

Pada 24 Agustus 1828, Benteng Du Bus, benteng Belanda pertama di Papua diresmikan. Peresmian ini diiringi dengan pembacaan proklamasi yang menyatakan bahwa wilayah-wilayah di pantai Selatan pulau Papua adalah milik Kerajaan Belanda. Pembacaan proklamasi ini menjadi titik awal masa kolonialisme di Papua (nantinya hal tersebut akan menjadi salah satu alasan

---

<sup>9</sup>Bachtiar H.W. “Sejarah Irian Jaya” dalam *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk* (1994), 45.

yang dipakai pihak nasionalis Papua untuk menyatakan bahwa secara politis Papua memang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang mengalami era kolonialis selama 350 tahun, Papua tidak selama itu).

Meskipun klaim atas Papua oleh Belanda sudah dilakukan sejak tahun 1828, barulah pada akhir abad 19 peletakan kekuasaan Belanda di sana betul-betul terwujud. Hal itu tak lepas dari keruntuhan kesultanan Tidore, dimana Sultan dan Putra Mahkota Tidore ditangkap dan dibuang ke Jakarta. Setelah masa itu Papua dikenal dengan nama *Nederlands Nieuw Guinea*, dan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Belanda.<sup>10</sup>

Setelah masa itu, Kerajaan Belanda terlibat perdebatan dengan Inggris terkait batas wilayah kekuasaan. Inggris menguasai bagian Timur pulau Papua, sementara Belanda di sebelah Barat. Perundingan antara Belanda dan Inggris menghasilkan batas daerah yang sekarang dikenal dengan perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.

Pada 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan, untuk mengukuhkan berdirinya Republik Indonesia yang saat itu memiliki batas wilayah dari Sumatera hingga Maluku, dari Sabang sampai Ambon. Melalui perdebatan sengit para tokoh nasional, Papua tidak dimasukkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena Papua masih berstatus *Nederlands Nieuw Guinea*.

Walau dengan status demikian, pada tahun 1946 ketika para tokoh nasional berkumpul dalam rangka pembahasan bentuk negara Serikat

---

<sup>10</sup>Bachtiar H.W. "Sejarah Irian Jaya" dalam *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*, (1994), 47.

Indonesia. Delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea juga hadir. Saat itu diwakili oleh Frans Kaisiepo, yang mengusulkan agar Papua diberikan status pemerintahan sendiri. Ia juga kemudian mengajukan nama Irian (berasal dari kata dalam bahasa Biak, *Iryan* yang artinya Uap Panas). Nama Irian ini oleh Soekarno dipropagandakan menjadi Ikut Republik Indonesia Anti Nederland.

Pada tahun 1949, Konferensi Meja Bundar diadakan di Belanda. Konferensi itu berlangsung panas. Di kubu Indonesia sendiri ketua Delegasi saat itu Mohammad Hatta mengecam pemasukan wilayah Papua ke dalam Republik Indonesia dengan alasan perbedaan Ras dan Kebudayaan, serta pemikiran bahwa lebih baik orang Papua menentukan nasibnya sendiri, karena pemasukan wilayah Papua ke dalam NKRI baginya adalah keputusan sepihak dan berbau ekspansi. Konferensi ini kemudian menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Desember 1945, dan sepakat untuk memutuskan nasib Papua Barat dikemudian hari.<sup>11</sup>

Sejak saat itu perdebatan sengit kerap terjadi antara Belanda dan Indonesia terkait kekuasaan atas Papua. Ironisnya perdebatan antara kedua pihak itu tidak melibatkan orang Papua secara langsung. Orang Papua hanya menonton permainan nasib mereka, entah kelak jatuh ke tangan siapa.

Dikalangan orang Papua kesadaran untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya telah tumbuh dengan pesat. Pada 5 April 1961, dibentuk komite Nasional New Guinea Raad, organisasi yang sama dengan BPUPKI di

---

<sup>11</sup>Wonda Sendius, *Jeritan Bangsa: Rakyat Papua Mencari Keadilan*(Yogyakarta: Galang Press, 2009) P.38 - 39

Indonesia yang bertugas mempersiapkan usaha-usaha proklamasi kemerdekaan Papua. Komite tersebut yang menghasilkan beberapa manifesto seperti nama negara yang akan didirikan, lambang, bendera, dan lagu kebangsaan.

Pada 1 Desember 1961, proklamasi kemerdekaan Papua dikumandangkan di Hollandia, saat ini kita kenal dengan nama Jayapura. Sayangnya, proklamasi ini tidak berhasil meyakinkan dunia. Perdebatan antara Indonesia dan Belanda kian memanjang.<sup>12</sup>

Pada 19 Desember di tahun yang sama, Presiden Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Trikora. Yang secara politis menolak proklamasi kemerdekaan Papua beberapa minggu sebelumnya. Komando tersebut menghasilkan Operasi Trikora yang terkenal. Militer Indonesia pun merapat ke Pulau Papua.<sup>13</sup>

Pada 1 Oktober 1962, Papua berada di bawah kekuasaan *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Yang memfasilitasi pengadaan *Act of Free Choice* atau yang kita kenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang baru terlaksana tahun 1969. Direntang waktu antara 1963 sampai 1969, Militer Indonesia telah memasuki Papua dengan tujuan “mempersiapkan” segala sesuatu tentang Pepera. Pada masa itu banyak terjadi perlawanan rakyat Papua terhadap pihak militer Indonesia, seperti

---

<sup>12</sup>Dumupa Yakobus, *Berburu Keadilan Di Papua: Mengungkap Dosa-Dosa Politik Indonesia Di Papua Barat*(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 32

<sup>13</sup>Diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi\\_Trikora](http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora) pada 18 April 2013 pukul 20.50 WIB.

yang perlawanan di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Awom. Namun perlawanan orang Papua tidak dapat menandingi senjata canggih milik pihak militer Indonesia. Tekanan tersebut menghasilkan proses jalannya Pepera yang tidak jujur dan tidak demokratis.

Pepera yang seharusnya dijalankan dengan jujur, adil, dan bijaksana telah dikotori oleh pihak militer Indonesia yang saat itu telah lebih dulu menyebarkan teror. Pepera yang terjadi di Papua pada tahun 1969 tidaklah seperti Pemilihan Umum yang kita lakukan selama ini. Di mana tiap pribadi berhak menentukan suaranya sendiri. Dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang hidup saat itu, hanya 1026 orang yang diikutkan pada Pepera tersebut, 982 pria dan 40 wanita. Fakta mengatakan bahwa ke 1026 orang tersebut ditunjuk dan dipilih oleh pemerintah Indonesia, dan sangat menyedihkan bahwa ke 1026 orang itu tidaklah murni pribumi Papua, tapi sebagian adalah warga pendatang dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku yang saat itu telah menetap di sana.<sup>14</sup>

Pepera dimulai di awal tahun 1969 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969. Hasil Pepera dibawa ke PBB dan disepakati dalam sidang PBB tanggal 19 November 1969. Sejak saat itu Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diberi nama Irian Jaya.

Orang Papua menganggap dirinya tidak diikutkan dalam menulis sejarah negerinya sendiri. Mereka merasa dipaksa dan didikte menuliskan

---

<sup>14</sup>Wonda Sendius, *Jeritan Bangsa: Rakyat Papua Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2009) p.38 - 39

jalan hidup generasi mereka. Keterpaksaan dalam menuliskan sejarah ini menjadi luka hati yang menjelma menjadi salah satu alasan mengapa orang Papua ingin merdeka secara politis.

## **2. Kekerasan Politik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.**

Sejarah pelanggaran HAM di Papua telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 1978 Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer. Beberapa tahun sebelum itu militer Indonesia melakukan berbagai operasi yang entah terluput atau sengaja dilupakan oleh sejarah bangsa ini. Operasi Militer tersebut dimaksudkan untuk membasmi gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) yang oleh pihak militer Indonesia dianggap sebagai musuh utama NKRI di Tanah Papua. Pada kenyataannya, identitas korban yang jatuh selama operasi-operasi tersebut masih tersamar, sulit untuk membedakan mana aktivis atau pasukan OPM dan yang mana masyarakat biasa, sehingga tak dapat dihindari lagi, banyak masyarakat biasa yang ikut menjadi korban dalam Operasi-Operasi Militer tersebut.

Kekerasan Militer di atas Tanah Papua dimulai pada Agustus 1962 dengan sebuah operasi yang disebut Operasi Infiltran (1962-1963), kemudian dilanjutkan Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Bharatayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Pamungkas (1971), Operasi Jayawijaya (1977-1980), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983), Operasi Sapu Bersih dan Operasi Gagak (1985-1987), Operasi Kasuari I (1987-1988), Operasi Kasuari II (1989), Operasi Rajawali I dan II (1990-1991), Operasi Map Nduma (1996), setelah

itu pada tahun 1998 status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut dari Papua, namun tercatat masih satu lagi operasi militer yang terjadi setelahnya yaitu Operasi Pengkondisian Wilayah (2000-2003) yang menuntut korban jiwa seorang aktifis Papua, sekalian seorang *Ondofolo* (Kepala Suku) untuk wilayah Sentani, Theys Hiyo Eluay.<sup>15</sup>

Yang lebih menyedihkan lagi, tindakan kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada kaum pria saja, tetapi juga kaum wanita. Dalam laporannya, tim peneliti dari Yale University mengisahkan beberapa kekerasan yang terjadi terhadap kaum wanita Papua.

*“While the reports of rape and violence against indigenous Papuan women by the*

*Indonesian military are legion, two examples demonstrate especially clearly the use of rape to inflict serious bodily and mental harm upon West Papuans. First, in 1970, soldiers patrolling the jungle border area shot and killed a pregnant woman, cut the baby from the mother’s womb, and dissected it in front of 80 women and children of the village. At the same time, a group of soldiers raped and killed the pregnant woman’s sister. In 1998, in order to disrupt a pro-independence demonstration, the Indonesian navy used force on the participants.*

*That women were taken out to sea on Indonesian navy ships, where they were raped, sexually mutilated and thrown overboard. Women’s corpses reportedly washed up on the Biak coast. Some of them showed signs of sexual mutilation; breasts had been removed”*

“Sementara itu, laporan perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan asli Papua oleh Militer Indonesia sangatlah banyak, dua contoh yang menunjukkan bagaimana kekerasan terutama perkosaan menimbulkan luka serius pada fisik dan mental orang Papua Barat. Pertama, pada tahun 1970, kelompok tentara yang berpatroli di daerah perbatasan menembak dan membunuh seorang wanita hamil, memotong bayi dari rahim sang ibu, dan dibedah di depan 80 wanita dan anak-anak desa. Pada saat yang sama, sekelompok tentara memperkosakan dan membunuh adik wanita hamil

<sup>15</sup>Banundi Simon Rizyard., “Pendekatan Keamanan Untuk Papua” dalam *Narasi Sejarah Sosial Papua: Bangkit Dan Memimpin Dirinya Sendiri*, (Desember 2011), 16 – 23

tersebut. Pada tahun 1998, dalam rangka menghentikan demonstran pro-kemerdekaan yang sedang berdemonstrasi, Angkatan Laut Indonesia menggunakan kekerasan pada peserta. Mereka membawa perempuan-perempuan ke laut dengan kapal Angkatan Laut Indonesia, kemudian perempuan-perempuan itu diperkosa, dimutilasi, dan dibuang ke laut. Mayat perempuan-perempuan itu dilaporkan terdampar di pantai Biak. Beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda mutilasi seksual, seperti payudara yang telah dipotong”<sup>16</sup>

Kekerasan Militer yang menimpa kaum perempuan Papua ternyata memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Meka D Goby, seorang tokoh aktifis perempuan Papua menyatakan bahwa tindak kekerasan tersebut adalah bentuk dari pelampiasan emosi pihak Militer Indonesia yang memang kesulitan untuk mengejar dan menangkap para prajurit OPM, sehingga mereka mengganti sasarannya ke warga biasa dengan maksud mempermalukan OPM, melecehkan pandangan politik OPM, serta memancing mereka keluar dari tempat persembunyiannya.<sup>17</sup>

Apapun alasannya, selama 20 tahun Papua berstatus DOM, banyak sekali tindakan pelanggaran HAM yang bahkan hingga saat ini masih terasa efek dan traumanya. Bekas-bekas kekerasan fisik dan mental, masih dirasakan para korban maupun saksi yang banyak diantara mereka yang masih hidup hingga saat ini. Sejarah kekerasan tersebut sangat mempengaruhi cara pandang orang Papua terhadap para imigran yang datang ke sana (akan dibahas pada bab berikutnya).

<sup>16</sup>The Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, “Indonesian Human Rights Abuses in West Papua” dalam *Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control* (April 2004), 62

<sup>17</sup>Goby Meka D, *Perempuan Papua Barat: Dalam Kekerasan Militer, Budaya, Ekonomi, dan Kesehatan* (Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2007), 74

Tim Peneliti dari Yale University tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa tindak kekerasan yang terjadi di Tanah Papua telah sangat parah, bahkan telah menuju ke arah genosida, atau pemusnahan etnis. Jumlah korban yang telah mereka rinci, berkisar 300.000 jiwa, terhitung sejak diberlakukannya status Daerah Operasi Militer di Papua, hingga saat info tersebut diturunkan.

Semua catatan buruk itu terlupakan dan tidak pernah disinggung lagi oleh pemerintah negeri ini. Hal ini menghasilkan “luka hati” yang berkepanjangan sehingga wajar saja jika konflik Papua terus mencuat dan hampir tidak berujung.

### **3. Inkonsistensi Pemerintah dan Lambannya Pembangunan Di Papua**

Lambannya pembangunan di Papua dapat disebabkan oleh macam-macam alasan. Salah satunya adalah keadaan alamnya yang memang sangat dahsyat dan sulit ditembus. H. Colijn yang pada tahun 1904 ditugaskan pemerintah Belanda untuk memberikan laporan tentang Papua menyarankan pemerintah Belanda untuk tetap menguasai Papua, namun menjalankan pemerintahan di sana secara tidak langsung, dalam hal ini melalui Kesultanan Tidore. Alasannya karena pelaksanaan pemerintahan secara langsung akan menghabiskan biaya besar, usul itu disetujui oleh pemerintah Belanda di Batavia (saat ini Jakarta). Alasan utama Colijn menyarankan hal tersebut tidak lain karena ia telah melihat sendiri kondisi alam Papua.

Kepentingan Belanda di atas Papua hanyalah karena alasan ekonomi. Secara ekonomi Papua memang tidak menguntungkan saat itu, tidak seperti Maluku yang diperebutkan mati-matian karena rempah-rempahnya. Jiwa ekspansi mereka tidak membuat mereka berpikir untuk memperhatikan nasib rakyat Papua sendiri.<sup>18</sup>

Lepas dari segala pertikaian yang terjadi sebelum Papua berintegarsi ke NKRI, pada saat masuk ke dalam NKRI, banyak orang Papua tentu merindukan nasib yang lebih baik. Lebih sejahtera, pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai. Namun pembangunan di Papua berjalan sangat lambat.

Dari 2.556.419 orang penduduk Papua pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin mencapai 43% (BPS Papua 2006). Sebagai implikasinya, jumlah keluarga yang dapat dikategorikan miskin juga bertambah. Menurut keterangan Ketua BPS Provinsi Papua, 47,99% keluarga di Provinsi Papua dan 36,85% keluarga di Provinsi Papua Barat pada Maret 2006 dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Selain itu desa-desa di Papua juga termasuk dalam kategori desa miskin atau desa tertinggal. Mayoritas desa di Papua (82,83%) dan di Papua Barat (81,29%) merupakan desa tertinggal.<sup>19</sup>

Untuk mengatasi polemik pembangunan Papua tersebut, pemerintah memberikan status Otonomi Khusus untuk Papua. Dana Otonomi Khusus yang melimpah itu diharapkan dapat membantu mensejahterakan Papua

---

<sup>18</sup> Kaisiepo Manuel "Yang Diberkati Yang Dilupakan" dalam *Ekspedisi Tanah Papua*, *Laporan Jurnalistik Kompas* (November, 2008) 61

<sup>19</sup> Tim LIPI, *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present and Securing The Future*(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 15.

secara signifikan. Agaknya Otomi Khusus justru menjadi permasalahan baru di Papua. Pihak orang Papua sendiri saling berebut kekuasaan, banyak diantara para pejabat Papua yang tertangkap karena kasus korupsi.

Keadaan seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan keadaan alam Papua yang terbukti sangat kaya akan hasil alam baik darat maupun laut. Kekayaan yang tidak henti dikuras sementara orang asli Papua hanya segelintir yang merasakan manisnya, kebanyakan justru menganggap kekayaan tersebut sebagai kutukan.

Pengerukan alam Papua itu memberikan kerugian tidak hanya karena harta bumi orang Papua yang seharusnya untuk kesejahteraan orang Papua diambil orang asing, tetapi lebih buruk lagi, orang Papua kehilangan alamnya, kehilangan tempat berburu, bermain, dan tempat tinggalnya, kehilangan eksistensi mereka.

Untuk hal keseimbangan dengan alam, hampir semua suku di Papua memiliki kebijakan dan adat istiadat yang sama. Mereka tidak mengambil lebih dari alam, tetapi secukupnya. Sehingga kelestarian alampun ikut terjaga. Dengan pola hidup seperti itu, alam ikut tumbuh bersama manusia, sehingga manusia tidak pernah kekurangan bahan makanan atau kebutuhan lain dari alam.

Pengerukan kekayaan alam di Papua tidak menguntungkan rakyat Papua. Pada tahun 1967, dua tahun sebelum pelaksanaan Pepera, artinya Papua masih berstatus daerah yang disengketakan Belanda dan Indonesia, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak kerja PT. Freeport yang

akan dijalankan di daerah Timika. Secara hukum penandatanganan kontrak kerja itu cacat, karena status Papua bukan milik Indonesia saat itu. Anehnya pihak PBB yang saat itu telah berada di Papua dalam bentuk UNTEA tidak melakukan apa-apa atas keganjalan ini. Sampai saat ini orang Papua masih merasa dilecehkan oleh pihak pemerintah Indonesia yang secara sepihak berani mengizinkan orang asing mengeruk alam yang sama sekali bukan alam mereka.

Freeport berkembang pesat, keuntungan mereka diperkirakan lebih dari 1,5 miliar dollar AS per tahun. Areal pertambangan Freeport di Timika disebut-sebut sebagai mempunyai deposit ketiga terbesar di Papua, sedangkan untuk emas menempati urutan pertama.

PT. Freeport hanyalah satu dari sekian perusahaan yang menanamkan cangkangnya di bumi Papua, ada banyak lagi perusahaan lain dengan macam-macam usaha, minyak, batu bara, nikel, tembaga, gas alam, dan lain sebagainya.

Semakin banyak perusahaan masuk ke sana, semakin luas alam Papua yang akan rusak. Imbasnya, banyak suku di Papua yang kehilangan lahan hidup mereka. Ambil contoh Suku Amungme dan Suku Kamoro. Suku Amungme adalah pemilik gunung-gunung emas yang dikeruk Freeport, sementara Suku Kamoro adalah pemilik lahan yang saat ini menjadi areal pembuangan limbah Freeport. Sejak Freeport mulai “berkarya”, praktis suku Amungme harus diungsikan dari kampung halamannya karena kampung mereka akan ditambang. Pada tahun 1973 tiap hari 7.257 ton *tailing* dibuang

ke sungai Aikwa yang menjadi sumber kehidupan suku Kamoro dan beberapa suku lain. Tahun 1988 tailing yang dibuang kesana menjadi 31.000 ton dan tahun 2006 melonjak menjadi 223.000 ton per hari. Kebun sagu suku Kamoro di wilayah Ayuka dan Koperaporka mati, begitu juga dengan ikan-ikan dan hewan-hewan sungainya.<sup>20</sup>

Kisah tentang kekayaan alam yang diambil orang tentu saja memberi pengaruh pada pembangunan Papua. Bagaimana kita mau membangun rumah jika kita kecurian tiap hari? Selanjutnya pembangunan yang berjalan lamban ini berimbas pada pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua.

Orang Papua beranggapan dengan merdeka secara politis, mereka dapat mengatur diri sendiri secara mandiri, lepas dari hukum-hukum dan aturan yang dibentuk dan diterapkan kepada mereka dengan tidak memihak mereka. Dengan merdeka secara politis, mereka dapat memegang kendali penuh pada hasil alam dan bumi mereka yang selama ini dikeruk habis-habisan.

### 1. Marjinalisasi Pribumi Papua

“Marjinalisasi adalah situasi yang dialami oleh kelompok subordinat sebagai akibat dari relasi kekuasaan yang bersifat asimetris dengan kelompok dominan, namun masih terdapat ruang bagi kelompok subordinat ini untuk bertahan”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Arif Ahmad, “Tanah Emas Tanah yang Berdarah” dalam *Ekspedisi Tanah Papua, Laporan Jurnalistik Kompas* (November 2008) 40, 42

<sup>21</sup> Tim LIPI, 16

Beberapa tahun sebelum Pepera 1969, para imigran telah banyak berdatangan ke Papua. Mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kebanyakan dikirim ke sana untuk menjadi tenaga pengajar. Pada 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%, menjadi 4% pada 1971, dan menjadi lebih dari 35% pada tahun 2000. Pada tahun 2005 diperkirakan persentase tersebut menjadi 41% dan melonjak menjadi 53,5% pada 2011. Pada masa depan dikhawatirkan orang asli Papua akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

Sebagai akibatnya adalah kekhawatiran orang asli Papua akan marjinalisasi para ranah politik. Dengan menjadi penduduk minoritas misalnya, posisi politik orang asli Papua akan melemah karena suara mereka lebih kecil daripada pendatang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.<sup>22</sup>

Data BPS Provinsi Papua pada tahun 2006, sebagaimana dikutip oleh hasil penelitian LIPI, menunjukkan bahwa jumlah penduduk asli Papua mencapai 1.460.846 orang pada tahun 2006. Data tiga tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2003 menyatakan bahwa pada tahun tersebut kota-kota provinsi, kabupaten, dan kota dihuni oleh 90% pendatang yang menguasai hingga 90% perekonomian, perdagangan, tenaga kerja, transportasi, kantor-kantor swasta, dan bisnis lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tim LIPI, *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present and Securing The Future* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 17.

<sup>23</sup> Ibid p.15

Kenyataan di atas menjadikan timbulnya kecemburuan sosial yang tinggi antara pribumi Papua dengan kaum pendatang. Dalam ranah budaya, orang Papua menjadi kurang bebas mengekspresikan kesenian dan budaya mereka karena merasa selalu dicurigai sebagai praktik politik separatisme. Ambil contoh kasus musisi ternama Papua, Arnold Clement Ap yang berusaha sekuat tenaga memperkenalkan budaya asli Papua hingga ke mancanegara, namun justru dituduh sebagai antek-antek gerakan separatis. Arnold Ap akhirnya mati ditangan militer Indonesia dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Jika hal ini terus terjadi, dan seniman serta budayawan Papua tidak bebas dalam berekspresi, budaya Papua seperti apa yang harus diperkenalkan kepada dunia luar?

Segala permasalahan yang saling menumpuk dan tak henti ini berimbas pada terjadinya gejolak sosial di Papua. Jika merenungkan berbagai kenyataan yang terjadi di Tanah Papua, sangat beralasan jika masyarakat pribumi Papua menuntut kesejahteraan, dalam banyak bentuk, salah satunya adalah menuntut kemerdekaan secara politis yang artinya Papua berdiri sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak masyarakat Indonesia tahu tentang hal tersebut, namun kebanyakan tidak tahu apa yang mendorong orang Papua menginginkan hal tersebut. Tugas Akhir berjudul *Memoria Passionis* yang dibawakan ini juga bermaksud mengupas hal-hal yang mengakibatkan mengapa orang Papua ingin merdeka secara politis.

Sebagai seorang putra Papua, penulis memiliki ikatan emosional yang sangat dalam dengan tanah kelahirannya. Apa yang dirasakan dan dilihat sejak kecil ditambah lagi dengan kenyataan-kenyataan yang menyusul diketahui, membuat penulis merasa harus melakukan sesuatu menyikapi hal tersebut, tentu saja dengan disiplin ilmu yang dialami. Hal inilah yang melatarbelakangi pemilihan tema ini sebagai judul dan tema Tugas Akhir.



## **B. Rumusan Penciptaan**

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan akan terfokus pada beberapa rumusan, yaitu sebagai berikut.

2. Bagaimana konflik di Papua terjadi
3. Bagaimana memvisualisasikan konflik Papua tersebut dalam seni lukis?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Seni tidaklah berdiri sendiri, melainkan muncul dan hidup ditengah masyarakatnya. Oleh karena itu tiap karya seni diharapkan memiliki tujuan dan manfaat yang baik, tidak hanya bagi seniman, tetapi juga khalayak. Lebih jauh karya tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi perubahan dalam kehidupan masyarakat.

### **1. Tujuan Penciptaan**

- a. Menciptakan karya seni lukis yang kreatif, memiliki nilai estetis yang baik, dan menarik untuk diapresiasi.
- b. Mengupas dan mendalami permasalahan yang terjadi di Papua dan menyuguhkan permasalahan tersebut kepada khalayak lewat media seni lukis, sehingga khalayak tidak salah berpikir dan tidak salah menanggapi permasalahan yang terjadi di Papua.

- c. Jika pengertian tersebut telah ditanamkan, diharapkan dapat berfungsi sebagai ajakan untuk memperbaiki keadaan di Papua.
- d. Menjadikan seni lukis sebagai suara yang menyuarakan tanggapan, kritik, dan ide pribadi tentang konteks yang dialami.

## 2. Manfaat Penciptaan

- a. Mengasah teknik yang telah dialami selama menempuh tugas belajar.
- b. Mengerti lebih dalam tentang permasalahan yang terjadi di Papua.
- c. Meningkatkan kecintaan kepada Tanah Air, serta semangat untuk menyuarakan ketertinggalan yang sedang dialami di Tanah Papua.
- d. Menghasilkan sebuah kepuasan dalam bersuara

## D. Makna Judul

*Memoria Passionis* adalah kata dari bahasa Latin yang jika diartikan secara harfiah berarti “mengenang penderitaan”. Kedua kata ini sangat tenar dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. Para penulis serta media massa pun sering menyebut kata tersebut. Istilah *Memoria Passionis* pertama kali dikenal khalayak ketika menjadi tajuk buku tahunan yang disusun oleh tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. Buku tersebut



merupakan catatan kilas balik peristiwa HAM, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam yang terjadi sepanjang satu tahun. Pemilihan *Memoria Passionis* sebagai judul Tugas Akhir ini merupakan hasil dari sebuah pertimbangan personal yang mencakup berbagai macam permasalahan yang terjadi di Papua. Papua adalah propinsi yang letaknya jauh dari ibukota. Kebanyakan orang hanya bisa ikut prihatin tentang keadaan Papua yang tak kunjung henti dilanda konflik, tetapi apakah semua orang di negara ini mengerti dengan seksama apa sebenarnya yang terjadi di sana?

Pada prinsipnya karya-karya yang akan ditampilkan tidak secara gamblang diartikan sebagai proses penggambaran penderitaan suatu masyarakat tertentu, namun lebih ingin membedah permasalahan yang terjadi pada obyek masyarakat yang dialami.

Mengapa harus penderitaan? Apakah berbicara tentang Papua berarti bicara tentang penderitaan? Pertanyaan tersebut mungkin saja akan timbul jika pembaca menyimak makna Tugas Akhir ini.

“Penderitaan tidak boleh diartikan semata-mata sebagai “kegenitan”, yaitu dianggap hanya untuk membesarkan satu sisi sudut pandang diatas segala sudut pandang yang lain”<sup>24</sup>

Istilah *Memoria Passionis* yang dipakai oleh SKP Keuskupan Jayapura muncul bukan sebagai jawaban pasti, namun sekadar sebagai penjelasan

---

<sup>24</sup>Dumupa Yakobus, *Berburu Keadilan Di Papua: Mengungkap Dosa-Dosa Politik Indonesia Di Papua Barat*(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), -xx-.

terhadap pertanyaan khalayak "Apa sebenarnya yang terjadi di Papua?" *Memoria Passionis* tidak mendikte, tetapi menerangkan, sehingga khalayak diberikan kebebasan menilai sendiri seperti apa konflik Papua yang sebenarnya.

Dalam konteks inilah *Memoria Passionis* dibawakan dalam karya Tugas Akhir ini. Berbekal dari sumber-sumber pustaka serta pengalaman pribadi selama hidup di Papua, ditambah dengan berbagai pandangan yang didapatkan selama proses belajar, *Memoria Passionis* dirangkai tidak sekadar sebagai sarana ekspresi hati, atau sebagai sarana hiburan bagi penikmat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjembatani tabir gelap konflik Papua dengan tanda tanya yang beredar pada kebanyakan masyarakat negeri ini.

